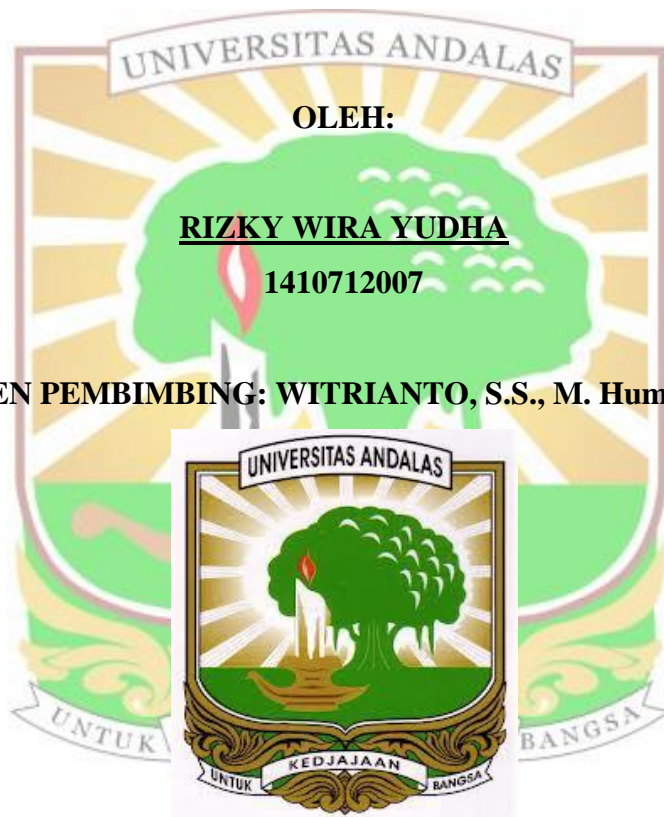


SEJARAH PEMERINTAHAN NAGARI SIJUNJUNG TAHUN

1983-2019

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora
Pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas*



DOSEN PEMBIMBING: WITRIANTO, S.S., M. Hum., M Si.

**JURUSAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG**

2021

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Sejarah Pemerintahan Nagari Sijunjung Tahun 1983-2019”. Nagari Sijunjung terdapat di Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung. Mata pencarian dari masyarakat Nagari Sijunjung sebagian besar adalah petani, serta profesi lain seperti pedagang dan wiraswasta.

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode sejarah yang terdiri atas empat tahap, yakni heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Tahap pertama adalah heuristik yang merupakan pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian. Pada tahap pengumpulan data ini dilakukan melalui studi pustaka dan pengumpulan data di lapangan yang dilakukan dengan metode sejarah lisan dan wawancara. Data yang diperoleh akan diklasifikasikan menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Penulisan diarahkan dalam bentuk deskriptif naratif. Data-data yang diperoleh akan dilanjutkan dalam tahapan kritik sumber dan tahapan yang terakhir adalah historiografi atau penulisan.

Pelaksanaan Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerataan Sistem Pemerintahan Desa yang dilaksanakan pada tahun 1983 berdampak besar pada unit pemerintahan terendah di Sumatera Barat, yakni nagari. Nagari yang sebelumnya adalah suatu kesatuan wilayah yang tidak hanya terdiri dari suatu wilayah pemerintahan, melainkan juga suatu kesatuan adat, digantikan oleh sistem pemerintahan desa yang lebih bersifat hanya sebagai kesatuan wilayah administratif saja serta desa-desa yang ada terdiri dari wilayah nagari yang dipecah menjadi beberapa wilayah.

Dampak dari pemerintahan desa ini adalah dengan wilayah yang lebih kecil, membuat masyarakat lebih mudah dalam melaksanakan kegiatan administratif yang ada. Dampak buruknya adalah wilayah desa yang terdiri dari pecahan nagari, tidak mampu melaksanakan setiap kegiatan dengan baik, karena tidak meratanya sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, maupun alam dan tidak meratanya sarana dan prasarana yang terdapat di masing-masing desa.

Setelah berada dalam sistem pemerintahan desa selama 18 tahun, keluar kebijakan kembali ke sistem pemerintahan nagari yang disambut antusias oleh masyarakat yang merasa sistem pemerintahan tersebut dirasa lebih cocok bagi masyarakat Sumatera Barat.

Kata Kunci: Dampak, Desa, Masyarakat, Nagari, Pemerintah

ABSTRACT

This research is entitled "The History of the Government of Nagari Sijunjung in 1983-2019". Nagari Sijunjung is located in Sijunjung District, Sijunjung Regency. The livelihoods of the people of Nagari Sijunjung are mostly farmers, as well as other professions such as traders and entrepreneurs.

The writing method used in this paper uses the historical method which consists of four stages, namely heuristics, criticism, interpretation and historiography. The first stage is heuristics which is the collection of data related to research. At this stage of data collection is done through literature study and data collection in the field which is done by using oral history and interview methods. The data obtained will be classified into primary sources and secondary sources. Writing is directed in the form of descriptive narrative. The data obtained will be continued in the source criticism stage and the last stage is historiography or writing.

Implementation of Law No. 5 of 1979 concerning the Equity of Village Administration System which was implemented in 1983 had a major impact on the lowest government unit in West Sumatra, namely the nagari. Nagari, which was previously a territorial unit that did not only consist of a government area, but also a customary unit, was replaced by a village government system which was more of an administrative area unit and the existing villages consisted of nagari territory which was divided into several villages. region.

The impact of this village government is that with a smaller area, it makes it easier for the community to carry out existing administrative activities. The bad impact is that the village area, which consists of fragments of the nagari, is unable to carry out every activity properly, due to the unequal distribution of available resources, both human and natural resources, and the uneven distribution of facilities and infrastructure in each village.

After being in the village government system for 18 years, the policy was issued to return to the nagari government system which was enthusiastically welcomed by the people who felt that the government system was more suitable for the people of West Sumatra.

Keywords: Impact, Village, Community, Nagari, Government